

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO	
	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
	Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia	
	Telepon (0352) 481124, 487662 Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id website : www.umpo.ac.id Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B (SK Nomor 77/SK/BN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)	

Nomor	: 620/IV.2/PN/2024	Ponorogo, 31 Oktober 2024
Lampiran	: -	
Perihal	: <i>Permohonan Ijin Penelitian dan Konfirmasi Data</i>	

Kepada :
Yth. Kasat Lantas Polres Pacitan
di –
TEMPAT

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka pencarian data untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi, maka kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu mohon untuk memberikan ijin Penelitian dan Pengadaan data-data bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di kantor yang Bapak/ Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama	: Erico Melandri Shaka
2. NIM	: 23222178
3. Fakultas/Program Studi	: FISIP/Illmu Pemerintahan
4. Semester	: 3 (tiga)
5. Alamat Mahasiswa/HP	: RT 01/RW 01 Dusun Kutu Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo/081233419891
6. Waktu Penelitian	: Bulan November 2024
7. Judul Penelitian	: Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kabupaten Pacitan

Data yang dicari : 1. Data Primer
Survey/pengamatan lapangan, wawancara
2. Data Sekunder
data lain yang berkaitan dengan penelitian

Lokasi penelitian : Polres Pacitan

Demikian atas pemberian ijin, bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Mengetahui, Dekan,  Agus Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D NIDN. 19860325 201309 12	Dosen Pembimbing,  Irvan Nur Ridho, M.Si NIDN. 0728048904
---	---

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PACITAN
Jalan Ahmad Yani No. 60 Pacitan 63512

Pacitan, 1 November 2024

Nomor : B/ 23 /XI/LIT.1.4./2024/SATLANTAS
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian dan Konfirmasi Data

Kepada

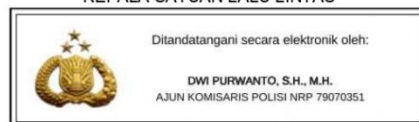
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Ponorogo

di

Pacitan

1. Rujukan :
 - a. Surat Permohonan Universitas Muhammadiyah Ponorogo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 620/IV.2 /PN/2024 Tanggal 31 Oktober 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini memberikan ijin Penelitian dan Pengadaan data - data bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai berikut:
 - a. Nama : Erico Melandri Shaka;
 - b. NIM : 23222178;
 - c. Fakultas/Prodi : FISIP/Ilmu Pemerintahan;
 - d. Semester : 3 (tiga);
 - e. Waktu Penelitian : Bulan November 2024;
 - f. Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Electronic Traffic Lax Enforcement (ETLE) Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kabupaten Pacitan;
 - g. Tempat : Polres Pacitan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PACITAN POLDA JATIM
KEPALA SATUAN LALU LINTAS



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 3. Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI ILMU PEMERINTAHAN

NAMA : ERICO MELANDRI SHAKA
NIM : 23222178
PEMBIMBING I : IRVAN NUR RIDHO, M.Si
PEMBIMBING II : DR. DIAN SULUH KUSUMA DEWI, M.AP
JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 PASAL 272 TENTANG ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MELAKUKAKAN KESADARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN POCITAN

NO.	TANGGAL	BAB	REVISI	PARAF PEMBIMBING
1	30/04/24	I	Judul dan Topik	f
2	06/05/24	I	Penyesuaian teori dan DO	f
3	21/05/24	I	Perbaikan dan Penyesuaian Metode	f
4	04/06/24	I	Acc Sempro	f
5	14/11/24	II dan III	Pembuatan SUB BAB II dan III	f
6	21/11/24	II dan III	Penyesuaian daftar wawancara	f
7	12/12/24	II	Memperbaiki BAB II	f
8	19/12/24	I	Penyesuaian Penelitian terdahulu	f
9	7/1/25	I	Penyesuaian Penyajian dan Analisis	f
10	9/1/25	III	Perbaikan Analisis data	f
11	13/1/25	III	Perbaikan Penyajian data	f
12	22/1/25	IV	Penyesuaian kesimpulan dan saran	f
13	30/1/25	-	Acc Skripsi	f
14				

Mengetahui,
Ketua Program

Pembimbing I
Irvan Nur Ridho, M.Si
NIDN. 0728048904

Pembimbing II
Dr. Robby Darwis Nawitun, S.IP., M.A.
NIDN. 0728028603

Pembimbing II
Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP
NIDN. 0703058109

Lampiran 4. Surat Hasil Cek Plagiasi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN
Jalan Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp. (0352) 481124, Fax (0352) 461796, e-mail : lib@umpo.ac.id
website : www.library.umpo.ac.id
TERAKREDITASI A
(SK Nomor 000137/ LAP.PT/ III.2020)
NPP. 3502102D2014337

SURAT KETERANGAN HASIL *SIMILARITY CHECK* KARYA ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Dengan ini kami nyatakan bahwa karya ilmiah ilmiah dengan rincian sebagai berikut :

Nama : Erico Melandri Shaka
NIM : 23222178
Judul : Implementasi Kebijakan Tentang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas di Kabupaten Pacitan
Fakultas / Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dosen pembimbing :

1. Irvan Nur Ridho, S.AP., M.Si
2. Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP

Telah dilakukan check plagiasi berupa **Haki** di Lembaga Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan prosentase kesamaan sebesar **19 %**

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 Februari 2025
Kepala Lembaga Layanan Perpustakaan



Ayu Wulansari, S.Kom, M.A
NIK. 19760811 201111 21

NB: Dosen pembimbing dimohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan dan keaslian karya beserta hasil cek Turnitin yang telah dilakukan

Lampiran 5. Draft Transkrip Wawancara

1. Bagaimana cara kerja sistem ETLE dalam merekam dan menindak pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana proses verifikasi dan validasi data pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE?
3. Bagaimana sistem ETLE dapat membantu meningkatkan kesadaran dan ketertiban berlalu lintas?
4. Upaya apa yang terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan ETLE di Pacitan?
5. Bagaimana cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ETLE?
6. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian tilang elektronik, baik dari sisi pengguna maupun penyelenggara?

Lampiran 6. Wawancara dengan Pihak Kepolisian Polres Pacitan (Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan dan Baur Tilang Sat Lantas Polres Pacitan)



*Wawancara dengan Bapak Bripta Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat
Lantas Polres Pacitan*



*Wawancara dengan Bapak Aipda Anggit Baskara Hendra Jabatan Baur Tilang
Sat Lantas Polres Pacitan*

Lampiran 7. Poster Konsep Implementasi ETLE dalam Mewujudkan Kesadaran Berlalu Lintas



Electronic Traffic Law Enforcement adalah sebuah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk mendeteksi, merekam, dan memproses pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini menggabungkan berbagai perangkat keras dan lunak, seperti kamerapengawas beresolusi tinggi, sensor, dan perangkat lunak analisis gambar, untuk memantau lalu lintas secara real-time.

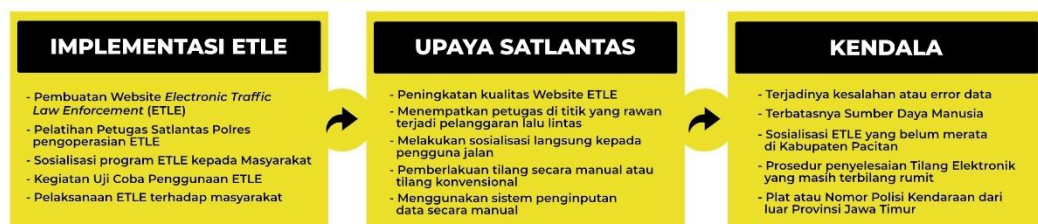
01 TUJUAN

Implementasi ETLE bagi masyarakat Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan kesadaran lalu lintas.

02 MASALAH

- Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 272
- Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Kab. Pacitan
- Kendala yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polres Kab. Pacitan

03. HASIL



Dengan diterapkannya **Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)** oleh Satlantas Polres Pacitan diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat.

